

ARTIKEL

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI APBD DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2006-2010

Yulia Frissari, Ari Subowo, Maesaroh

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang

ABSTRAKSI

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Salah satu output dari reformasi sektor publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan adanya reformasi ini daerah diberi kebebasan untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga muncullah kebijakan otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Masalah yang muncul adalah terjadi ketimpangan yang cukup signifikan dalam pengalokasian anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja pembangunan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan ekonomi makro dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dan terkait dengan pembangunan daerah. Upaya menjawab permasalahan ini dengan menggunakan teori evaluasi oleh Dunn yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan daerah, dalam hal ini pembangunan manusianya yang dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat yang dapat diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi. Disarankan perlu adanya keseimbangan dalam penyusunan proporsi alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan.

Kata kunci : Reformasi Sektor Publik, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah, dan Kemampuan Daya Beli Masyarakat.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2002).

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu output dari adanya reformasi sektor publik, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya reformasi ini daerah diberi

kebebasan untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Indonesia berbeda-beda untuk setiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Ada daerah yang alokasi anggaran pendapatannya 20% berasal dari pendapatan asli daerah dan ada juga daerah yang hanya 3% pendapatan daerahnya berasal dari pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan alokasi anggaran belanja, baik itu alokasi anggaran belanja pegawai maupun alokasi anggaran belanja pembangunan berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Ada daerah yang sudah mampu mengalokasikan pendapatan daerahnya sebesar 60% dari APBD untuk belanja pegawai dan 40% dari APBD untuk belanja pembangunan. Namun masih banyak juga daerah yang masih mengalokasikan pendapatan daerahnya lebih dominan untuk belanja pegawai atau sekitar 80% dari APBD untuk belanja pegawai dan 20% dari APBD untuk belanja pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan di daerah tersebut tidak akan tercapai secara optimal.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman integrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat

basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan perekonomian daerah akan semakin kuat dan mandiri sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional.

Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital* atau *capital goods* (barang-barang modal). Penanaman/penambahan modal terhadap persediaan barang modal biasanya disebut investasi (Kamaluddin, 1996: 71-72). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2005) investasi dalam kerangka pemerintah didefinisikan sebagai belanja modal/pembangunan yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Pengertian tersebut ditekankan pada penggunaan asset untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/publik. Padahal suatu asset di pemerintah (pusat atau daerah), khususnya asset tetap seperti dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur sarana dan prasarana publik, dan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut Belanja Modal (Halim dan Subiyanto, 2008: 4-5). Sehingga penginvestasian pemerintah yang berasal dari belanja modal berdasarkan dari tahun ke tahun akan berakumulasi menjadi akumulasi modal yang merupakan keharusan bagi pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju, sehingga semakin besar modal yang tersedia maka akan mempercepat pembangunan ekonomi (Suryana, 2000: 72).

Teori pertumbuhan ekonomi tersebut secara otomatis berkaitan erat dengan teori pengeluaran pemerintah dalam kerangka otonomi daerah.

Menurut model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan Walt Whitman Rostow dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring tahap-tahap pembangunan ekonomi yang pada tahap awal perkembangan ekonomi, pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar atau yang lebih dikenal dengan Teori Dorongan Kuat (*big push theory*) (Mangkoesoebroto, 1993: 170). Sedangkan Musgrave berpendapat bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi diharapkan pengeluaran pemerintah untuk barang modal harus lebih besar sebagai pemberian fasilitas sarana dan prasarana publik untuk pengembangan investasi dari sektor swasta, yang demikian diharapkan bahwa peranan pemerintah dalam pembentukan modal akan menurun setelah berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi (Mangkoesoebroto, 1993: 170). Sedangkan teori pengeluaran yang dikemukakan oleh Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran dan kegiatan pemerintah yang semakin meningkat telah lama dirasakan, tendensi makin meningkatnya pengeluaran pemerintah oleh Wagner dinamakan "*Gesetz der wachsenden Ausdehnung den Staatstatigkeiten*" atau hukum selalu makin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara (*law of ever increasing state activities*). Sehingga hukum Wagner tersebut oleh R.A. Musgrave disebut hukum "*growing public expenditure*" atau hukum makin meningkatnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Soetrisno, 1984: 364). Peningkatan kegiatan pemerintah difokuskan untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun keterkaitan antara teori dengan kenyataan mengindikasikan adanya perbedaan dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 hingga 2010 pendapatan daerah Kota Pematangsiantar meningkat secara konstan. Namun kenaikan pendapatan ini tidak diikuti oleh naiknya belanja untuk pembangunan daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan variabel-variabel anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah. Dimana APBD pada dasarnya memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pembangunan Daerah
3. Ekonomi Makro

Adanya kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara teori alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar karena sudah bukan rahasia umum bahwa besarnya pengeluaran anggaran belanja pegawai memunculkan jargon "*pemerintah merupakan sumber tempat pemborosan*" yang ironisnya pengeluaran anggaran lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai yang dinilai kurang produktif disebabkan tidak memiliki nilai tambah untuk menambah kekayaan/asset pemerintah berupa asset tetap, bangunan, gedung, jalan, infrastruktur dan lain-lain serta, menurut teori pertumbuhan ekonomi,

seyogyanya pemerintah lebih meningkatkan pembangunan ekonomi dalam rangka untuk mencapai tahap tinggal landas yang menurut Rostow dinilai berdasarkan laju pembangunan/pertumbuhan ekonomi.

Dari proses penilaian (evaluasi) yang peneliti lakukan terhadap beberapa data diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Alokasi APBD dalam Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Pematangsiantar Tahun 2006-2010”*.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Sampai seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan Makro Ekonomi Tahun 2006-2010 Kota Pematangsiantar saat ini?
2. Sampai seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan pembangunan daerah, khususnya pembangunan manusianya?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan ekonomi makro Tahun 2006-2010 di Kota Pematangsiantar.

2. Untuk mengkaji seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan pembangunan daerah, khususnya pembangunan manusianya.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian evaluasi kinerja program ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam studi di perguruan tinggi, khususnya disiplin ilmu Administrasi Publik. Serta mengetahui keilmuan di bidang sektor publik.
- b. Kegunaan praktis dalam pelaksanaan penelitian, yaitu :
 1. Memberikan informasi mengenai seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan ekonomi makro Tahun 2006-2010 di Kota Pematangsiantar.
 2. Memberi informasi mengenai seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan pembangunan daerah, khususnya pembangunan manusianya.
 3. Peneliti Selanjutnya
Memberikan kontribusi atau referensi tambahan sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik/keuangan daerah serta pengukuran kinerja pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel-variabel yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial yang terjadi, yang menimbulkan suatu masalah dan masalah tersebut membutuhkan suatu penyelesaian.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan metode kualitatif dengan analisis data komparasi konstan, yaitu suatu analisis data yang gagasannya dari ide analisis konstan adalah bagaimana membangun teori berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh serta di analisis sehingga menghasilkan teori (*grounded analisis*). Teknik analisis dengan melakukan wawancara kepada informan.

PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah per tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan utama diselenggarakannya otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Sedangkan menurut Bastian (2006:354) tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Landasan hukum diselenggarakannya otonomi daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Perubahan Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mardiasmo, 2002: 24). Kedua Undang-undang ini sebagai payung hukum pelaksanaan dan tonggak awal diselenggarakannya otonomi daerah.

Misi utama kedua Undang-undang ini adalah desentralisasi. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian, maka desentralisasi yang dimaksud adalah desentralisasi fiskal. Kebijakan pemerintah untuk menyerahkan urusan fiskal kepada daerah sangatlah tepat karena dengan adanya desentralisasi fiskal menjawab permasalahan lokal masyarakat karena pemerintah daerah merupakan pejabat publik yang dekat dengan masyarakat, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (*public interest*), termasuk didalamnya masalah kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, dan pembangunan sumber daya manusianya. Selain itu dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki suatu langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan adanya

desentralisasi fiskal diharapkan perekonomian daerah akan semakin kuat dan mandiri sehingga dapat memperkokoh perekonomian nasional.

Untuk menilai apakah kebijakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka dilakukan evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi fiskal. Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek hasil. Aspek proses, merujuk pada apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan? Aspek hasil, merujuk apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil yang telah ditetapkan (output atau outcomes). Penelitian ini lebih kepada aspek hasil yaitu untuk melihat apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Bila melihat data yang telah diperoleh, baik itu melalui data sekunder maupun wawancara mengenai alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di Kota Pematangsiantar adalah desentralisasi fiskal yang seharusnya membawa kesejahteraan kepada masyarakat karena pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat justru tidak mencapai hasilnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya laju inflasi selama lima tahun berjalan yaitu tahun 2006-2010. Terjadi peningkatan laju inflasi disebabkan oleh

kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Harga Konsumen. Dengan kenaikan harga-harga dan kenaikan laju inflasi ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat pun menurun. Penurunan daya beli masyarakat ini menunjukkan semakin kurang sejahteranya masyarakat Kota Pematangsiantar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tidak mencapai hasil untuk meningkatkan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian daerah. Disamping itu tidak tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berarti karena dana yang dialokasikan untuk melakukan program-program ternyata tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau memang dana yang sudah dianggarkan dalam APBD digunakan untuk menjalankan program-program peningkatan kesejahteraan, maka paling tidak program-program itu mampu memajukan perekonomian daerah. Dengan semakin baiknya perekonomian daerah, maka laju inflasi dapat diperkecil dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat semakin meningkat.

Jadi dapat disimpulkan dengan tidak berhasilnya kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah, maka secara tidak langsung kebijakan otonomi daerah juga tidak mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Karena tujuan diadakannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk menjawab permasalahan lokal masyarakat karena pemerintah daerah merupakan

pejabat publik yang dekat dengan masyarakat, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (*public interest*), termasuk didalamnya masalah kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, dan pembangunan sumber daya manusianya. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah bahwa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal belum menjawab keinginan masyarakat Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat dilihat dengan tidak stabilnya kemampuan daya beli masyarakat Kota Pematangsiantar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer masyarakat yang mau tidak mau harus dipenuhi karena kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat.

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari apa yang sudah peneliti dapatkan melalui penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komponen APBD

- ❖ Pajak dan Retribusi Daerah memberikan proporsi yang cukup dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini mengakibatkan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- ❖ Peningkatan pendapatan asli daerah bukan menjadi jaminan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana

dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya dana perimbangan dari tahun ke tahun, walaupun pendapatan asli daerah meningkat.

2. Makro Ekonomi

Ekonomi makro yang dilihat peneliti dalam penelitian ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi daerah termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pematangsiantar. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan daerah. Namun dalam penelitian ini pembangunan daerahnya tidak kepada pembangunan sarana dan prasarana, tapi pembangunan manusianya. Pembangunan manusia yang dimaksudkan peneliti dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat Kota Pematangsiantar yang dapat dilihat dari dua aspek yang sangat mempengaruhi dan memiliki hubungan berbanding lurus, yaitu Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi. Dimana kedua aspek ini mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi barang dan jasa kebutuhan pokok.

- ❖ Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk pembangunan akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung.

- ❖ Terjadi ketimpangan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan. Hal ini akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan karena dana yang ada tidak mampu untuk melakukan pembangunan keseluruhan bagian daerah Kota Pematangsiantar.

3. Pembangunan Daerah

- ❖ Peran investor sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya karena terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan investor. Keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dengan adanya kerja sama ini adalah berkurangnya pengangguran di daerah karena investor membuka usaha yang menyerap tenaga kerja. Keuntungan bagi investor adalah investor dapat berusaha dengan lahan yang disewakan oleh pemerintah, sehingga dana yang dikeluarkan investor berkurang. Namun walaupun ada peran investor, hal ini tidak secara signifikan mampu mengubah daerah untuk lebih maju. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- ❖ IHK dan Laju Inflasi berbanding terbalik dengan kemampuan daya beli masyarakat. Karena semakin tinggi IHK, maka laju inflasi juga

meningkat yang disebabkan harga-harga meningkat dan secara tidak langsung kemampuan daya beli masyarakat menurun karena harga-harga yang meningkat, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik.

- ❖ Selama jangka waktu penelitian yaitu 2006-2010 Kota Pematangsiantar mengalami inflasi terus menerus, sehingga kemampuan daya beli masyarakatnya pun dari tahun ke tahun semakin menurun juga.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pematangsiantar supaya kedepannya pemerintahan daerah ini semakin baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun masukan peneliti adalah :

1. Proporsi

Sebaiknya dalam penyusunan APBD, proporsi antara belanja pegawai dan belanja pembangunan lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat merugikan daerah dalam pelaksanaan pembangunan karena dana yang tersedia sangatlah minim. Hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Apabila pembangunan daerah mencapai tujuannya, maka segala aspek kehidupan akan semakin membaik, termasuk didalamnya

kehidupan ekonomi masyarakat akan membaik. Hal ini akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat Kota Pematangsiantar dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan sebaliknya, apabila pembangunan daerah tidak mencapai tujuan, maka inflasi yang diakibatkan oleh IHK yang terus meningkat akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun.

2. Public Private Partnership

Perlu adanya strategi yang lebih inovatif guna merangsang investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini diperlukan karena melihat kondisi keuangan yang dialokasikan untuk belanja pembangunan sangatlah rendah, sehingga investor enggan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah.

3. Akuntabilitas dan Kapasitas

Sebaiknya perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM pejabat pemerintahan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah se-efisien dan se-efektif mungkin untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. PDRB Kota Pematangsiantar Berbagai Tahun. Badan Pusat Statistik Pematangsiantar. Pematangsiantar.

Badan Pusat Statistik. Pematangsiantar Dalam Angka Berbagai Tahun. Badan Pusat statistik Pematangsiantar. Pematangsiantar.

Devas Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Eko, Yuli. 2009. *Ekonomi 1 : Untuk SMA dan MA Kelas X*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

J. Moelong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.

Mudjarat, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : Elex media Komputindo.

Siagian, Altito R. (2010). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus : Provinsi Jawa Barat)*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Simanjuntak, Robert A. 2005. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Editor : Anhar Ganggang. Jakarta : Yayasan TIFA.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Suparmoko, M. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2002. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset.

Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

_____, UU No. 22 /1999 dan UU No. 25/1999. Jakarta: Cemerlang.

_____, UU No. 32 /2004 dan UU No. 33/2004. Jakarta: Cemerlang.